

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS TENAGA KERJA KOPERASI DAN USAHA MIKRO KOTA TANJUNGPINANG
TAHUN 2024

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	UNSUR PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						11,697,013,728							12,294,513,728	DISNAKERKOPUM
	2.07	URUSAN PEMERINTAH BIDANG TENAGA KERJA						10,327,013,728							10,869,513,728	DISNAKERKOPUM
1.	2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah				BB	7,856,013,728			Tidak	Tidak		BB	8,044,513,728	SEKRETARIAT
	2.07.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				100%	23,000,000			Tidak	Tidak		100%	23,000,000	
	2.07.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	-	-	3 Dokumen	15,000,000	Tanjungpinang	APBD			OPD	3 Dokumen	15,000,000	
	2.07.01.2.01.02	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	-	1 Laporan	8,000,000	Tanjungpinang	APBD			OPD	1 Laporan	8,000,000	
	2.07.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				100%	5,794,613,728			Tidak	Tidak		100%	5,794,613,728	
	2.07.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				12 Bulan	3,944,613,728	Tanjungpinang	APBD			OPD	12 Bulan	3,944,613,728	
	2.07.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				98%	1,850,000,000	Tanjungpinang	APBD			OPD	98%	1,850,000,000	
	2.07.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah				95%	53,400,000			Tidak	Tidak		95%	53,400,000	
	2.07.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				24 Paket	23,400,000	Tanjungpinang	APBD			OPD	24 Paket	23,400,000	
	2.07.01.2.05.09	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				5 Orang	30,000,000	Tanjungpinang	APBD			OPD	5 Orang	30,000,000	
	2.07.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum perangkat daerah				98%	520,000,000			Tidak	Tidak		98%	572,000,000	
	2.07.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	35,000,000	Tanjungpinang	APBD			OPD	12 Paket	38,500,000	
	2.07.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				12 Paket	50,000,000	Tanjungpinang	APBD			OPD	12 Paket	55,000,000	
	2.07.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik yang Disediakan				12 Paket	95,000,000	Tanjungpinang	APBD			OPD	12 Paket	104,500,000	
	2.07.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Paket	110,000,000	Tanjungpinang	APBD			OPD	12 Paket	121,000,000	
	2.07.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				12 Dokumen	20,000,000	Tanjungpinang	APBD			OPD	12 Dokumen	22,000,000	
	2.07.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				2 Paket	50,000,000	Tanjungpinang	APBD			OPD	2 Paket	55,000,000	
	2.07.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	160,000,000	Tanjungpinang	APBD			OPD	12 Laporan	176,000,000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.07.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan pengadaan barang milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				75%	100,000,000			Tidak	Tidak		75%	100,000,000	
	2.07.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				10 Unit	100,000,000	Tanjungpinang	APBD			OPD	10 Unit	100,000,000	
	2.07.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah				98%	1,090,000,000			Tidak	Tidak		98%	1,199,000,000	
	2.07.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	10,000,000	Tanjungpinang	APBD			OPD		11,000,000	
	2.07.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	80,000,000	Tanjungpinang	APBD			OPD		88,000,000	
	2.07.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	1,000,000,000	Tanjungpinang	APBD			OPD		1,100,000,000	
	2.07.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah				95%	275,000,000			Tidak	Tidak			302,500,000	
	2.07.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				5 Unit	200,000,000	Tanjungpinang	APBD			OPD	5 Unit	220,000,000	
	2.07.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				12 Unit	75,000,000	Tanjungpinang	APBD			OPD	12 Unit	82,500,000	
			Tingkat Pengangguran Terbuka				5,60% - 5.40%							5,3- 5,10		
			Persentase Penempatan tenaga kerja				38.00%							39.00%		
2.	2.07.02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Tersusunnya Dokumen perencanaan ketenagakerjaan yang berkualitas.				32.86%	200,000,000			Tidak	Tidak		65.71%	200,000,000	BIDANG PENEMPATAN DAN PELATIHAN TENAGA KERJA
	2.07.02.2.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro				1 Dokumen	200,000,000			Tidak	Tidak		1 Dokumen	200,000,000	BIDANG PENEMPATAN DAN PELATIHAN TENAGA KERJA
	2.07.02.2.01.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Tersusunnya Rencana Tenaga Kerja Makro				1 Dokumen	200,000,000	Tanjungpinang	APBD			Kota Tanjungpinang	1 Dokumen	200,000,000	
			Prosentase Peningkatan Tenaga Kerja Yang Kompeten				32.86%							65.71%		
3.	2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Besaran calon tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi				32.86%	700,000,000			Tidak	Tidak		65.71%	900,000,000	BIDANG PENEMPATAN DAN PELATIHAN TENAGA KERJA
	2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi				2 Kegiatan	700,000,000			Tidak	Tidak		3 Kegiatan	900,000,000	BIDANG PENEMPATAN DAN PELATIHAN TENAGA KERJA
	2.07.03.2.01.01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan PelatihanKeterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah calon Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan				115 Orang	700,000,000	Tanjungpinang	APBD			Kota Tanjungpinang	115 Orang	900,000,000	
4.	2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Penempatan tenaga kerja				38.00%	650,000,000			Tidak	Tidak		39.00%	850,000,000	BIDANG PENEMPATAN DAN PELATIHAN TENAGA KERJA
	2.07.04.2.01	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase tenaga kerja yang diberdayakan				31.08%	400,000,000			Tidak	Tidak		33.78%	600,000,000	BIDANG PENEMPATAN DAN PELATIHAN TENAGA KERJA
	2.07.04.2.01.05	Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja				115 Orang	400,000,000	Tanjungpinang	APBD			Kota Tanjungpinang	125 Orang	600,000,000	
	2.07.04.2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah Aplikasi Informasi Pasar Kerja yang tersedia				1 Unit	250,000,000			Tidak	Tidak		1 Unit	250,000,000	BIDANG PENEMPATAN DAN PELATIHAN TENAGA KERJA
	2.07.04.2.03.01	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online				810 Orang	250,000,000	Tanjungpinang	APBD			Kota Tanjungpinang	810 Orang	250,000,000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, PKWT, LKS Bipartit, UMK, Struktur Skala Upah, dan terdaftar				57.80%							57.91%		
			Persentase Perselisihan Pekerja/ Buruh dan Pengusaha yang diselesaikan dengan Perjanjian				88.57%							91.18%		
			Besaran Pekerja/ Buruh yang menjadi peserta program BPJS Ketenagakerjaan				54.91%							55.39%		
5.	2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)				57.80%	921,000,000			Tidak	Tidak		57.91%	875,000,000	BIDANG HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
	2.07.05.2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1	Persentase Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama yang dilayani				100.00%	150,000,000			Tidak	Tidak		33.78%	150,000,000	BIDANG HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN JAMINAN SOSIAL
	2.07.05.2.01.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online				100 Perusahaan	150,000,000	Tanjungpinang	APBD			Kota Tanjungpinang	100 Perusahaan	150,000,000	
	2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah	Menurunnya angka perselisihan di Kota tanjungpinang.				31 Kasus	771,000,000			Tidak	Tidak		30 Kasus	725,000,000	BIDANG HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN JAMINAN SOSIAL
	2.07.05.2.02.01	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah				200 Orang	180,000,000	Tanjungpinang	APBD			Kota Tanjungpinang	200 Orang	180,000,000	
	2.07.05.2.02.02	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan				40 Perkara	41,000,000	Tanjungpinang	APBD			Kota Tanjungpinang	40 Perkara	45,000,000	
	2.07.05.2.02.03	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi				9 Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja	50,000,000	Tanjungpinang	APBD						
	2.07.05.2.02.04	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina				2 Lembaga	350,000,000	Tanjungpinang	APBD			Kota Tanjungpinang	2 Lembaga	350,000,000	
	2.07.05.2.02.05	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja				100 Orang	150,000,000	Tanjungpinang	APBD			Kota Tanjungpinang	100 Orang	150,000,000	
	2.17	URUSAN PEMERINTAH BIDANG KOPERASI DAN USAHA MIKRO						1,370,000,000							1,425,000,000	DISNAKERKOPUM
			Persentase Koperasi sehat				16.75%							18.88%		
			Persentase koperasi aktif				46.25%							48.67%		
6.	2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Koperasi yang sudah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi				6.47%	150,000,000			Tidak	Tidak		8.89%	160,000,000	BIDANG KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	2.17.03.2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/ Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pengawasan dan Pemeriksaan				10 Unit	150,000,000			Tidak	Tidak		10 Unit	160,000,000	BIDANG KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	2.17.03.2.01.01	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota				15 Unit	100,000,000	Tanjungpinang	APBD			Kota Tanjungpinang	15 Unit	110,000,000	
	2.17.03.2.01.02	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan	Jumlah Koperasi yang Memenuhi Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan	382 Unit	398 Unit	399 Unit	402 Unit	50,000,000	Tanjungpinang	APBD			Kota Tanjungpinang	405 Unit	50,000,000	
7.	2.17.04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase Koperasi Sehat				20 Unit	200,000,000			Tidak	Tidak		20 Unit	200,000,000	BIDANG KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	2.17.04.2.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Jumlah Koperasi Sehat				20 Unit	200,000,000			Tidak	Tidak		20 Unit	200,000,000	BIDANG KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	2.17.04.2.01.01	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan			20 Unit	10 Unit	50,000,000	Tanjungpinang	APBD			Kota Tanjungpinang	10 Unit	50,000,000	
	2.17.04.2.01.02	Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Mendapatkan Penghargaan Kesehatan				10 Unit	150,000,000	Tanjungpinang	APBD			Kota Tanjungpinang	10 Unit	150,000,000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
8.	2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase Peningkatan Pelatihan dan Kompetensi Pengurus Koperasi				20 Unit	250,000,000			Tidak	Tidak		20 Unit	275,000,000	BIDANG KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	2.17.05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pengurus koperasi yang sudah mengikuti diklat				20 Unit	250,000,000			Tidak	Tidak		20 Unit	275,000,000	BIDANG KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	2.17.05.2.01.01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM	Meningkatnya SDM pengurus koperasi.	135 Orang	162 Orang		100 Orang	250,000,000	Tanjungpinang	APBD			Kota Tanjungpinang	110 Orang	275,000,000	
9.	2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Meningkatnya Unit Koperasi				2.98%	50,000,000			Tidak	Tidak		2.98%	50,000,000	BIDANG KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	2.17.06.2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Unit Koperasi				5 Unit	50,000,000			Tidak	Tidak		5 Unit	50,000,000	BIDANG KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	2.17.06.2.01.01	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi	Meningkatnya Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi				5 Unit	50,000,000	Tanjungpinang	APBD			Kota Tanjungpinang	5 Unit	50,000,000	
		Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Usaha Mikro yang dibina	2.350 Orang	2.430 Orang	2.500 Orang	2.400 Orang							2.400 Orang		
10.	2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA	Persentase Usaha Mikro naik kelas.	0.34%	1.24%		1.02%	540,000,000			Tidak	Tidak		1.02%	540,000,000	BIDANG KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Meningkatnya Usaha Mikro naik kelas	50 Usaha Mikro	182 Usaha Mikro		150 Usaha Mikro	540,000,000			Tidak	Tidak		150 Usaha Mikro	540,000,000	BIDANG KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	2.17.07.2.01.02	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah pelaku Usaha yang sudah bermitra	50 Orang	88 Orang		50 Orang	180,000,000	180,000,000	APBD			Kota Tanjungpinang	50 Orang	180,000,000	
	2.17.07.2.01.04	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Pelaku usaha mikro yang berkembang		94 Orang		50 Orang	180,000,000	Tanjungpinang	APBD			Kota Tanjungpinang	50 Orang	180,000,000	
	2.17.07.2.01.06	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro dan Kewirausahaan	Jumlah SDM yang memahami pengetahuan kewirausahaan usaha mikro				50 Orang	180,000,000	Tanjungpinang	APBD			Kota Tanjungpinang	50 Orang	180,000,000	
11.	2.17.06	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase Usaha Mikro yang terfasilitasi.	0.34%	0.60%		0.34%	180,000,000			Tidak	Tidak		0.34%	200,000,000	BIDANG KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	2.17.06.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Meningkatnya jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan	50 Orang	88 Orang		50 Orang	180,000,000			Tidak	Tidak		50 Orang	200,000,000	BIDANG KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	2.17.06.2.01.01	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	50 Orang	88 Orang		50 Orang	180,000,000	Tanjungpinang	APBD			Kota Tanjungpinang	50 Orang	200,000,000	
	J U M L A H							11,697,013,728							12,294,513,728	

Tanjungpinang, 13 Maret 2023

KEPALA DINAS
TENAGA KERJA KOPERASI DAN USAHA MIKRO
KOTA TANJUNGPINANG

ACHMAD NUR FATAH, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19700113 199009 1 002